

CAPAIAN RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN KOTA BOGOR

Muhamad Azis Firdaus
Universitas Ibn Khaldun Bogor
Jl. Soleh Iskandar KM 2. Kota Bogor
muhamadazisfirdaus@yahoo.com
HP: 0813 8414 9386

Abstrak

Undang-undang otonomi daerah mendorong Kepala Daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya dengan lebih leluasa, diantaranya dalam penyusunan rencana pembangunan dan penggunaan aset yang dimiliki daerah untuk pembangunan daerahnya. Besarnya kekuasaan ini membutuhkan suatu mekanisme yang dapat mengamati dan mengevaluasi pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta realisasinya. Untuk melihat ini salah satunya adalah dengan melihat dari sisi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dengan menggunakan *Importance Performance Analysis*. Melalui bantuan Diagram Cartesius dapat diperlihatkan atribut-atribut tertentu dari objek yang termasuk pada kuadran I, atau kuadran II atau kuadran III atau kuadran IV. Kepuasan masyarakat Kota Bogor terhadap Kinerja pembangunan di Kota Bogor baru mencapai kurang dari 50% dengan beberapa dimensi masih berada pada posisi tidak memuaskan, dan hanya penataan Pedagang Kaki Lima yang dipersepsikan cukup puas.

Abstract

Regional autonomy laws encourage Regional Head to manage the wealth of the region with more flexibility, such as in the preparation of development plans and the use of assets owned areas for regional development. The magnitude of this power requires a mechanism to observe and evaluate the achievement of the Medium Term Development Plan and its realization. To see this one is to look on the side of people's satisfaction with the performance of Local Government by using Importance Performance Analysis. Through the help of the Cartesian diagram can be shown certain attributes of the object that is included in the first quadrant, quadrant or quadrants II or III or IV quadrant. Bogor City public satisfaction towards the development of performance in Bogor City reached below 50% with some dimensions are still in the position of not satisfactory, and only the arrangement of Street Vendors are perceived quite satisfied.

Kata kunci : Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Diagram Cartesius, Kepuasan masyarakat

I. PENDAHULUAN

Melalui UU No. 32 tahun 2004 pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menggali atau mencari sumber-sumber dana pembangunan serta keleluasaan dalam penggunaan dana tersebut. Pasca UU Otonomi Daerah ini, Pemerintah Daerah berubah fungsinya dari operator ke inisiator, regulator, evaluator. Pergantian Kepala Daerah dalam kurun waktu lima tahunan berdampak pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses pembangunan di daerah. Perencanaan telah menjadi semacam gaya hidup bagi para pemimpin serta aparat lembaga-lembaga dan kementerian dalam pemerintahan. Setiap lima tahun atau lebih, tatkala tahapan akhir perencanaan pembangunan tiba, berlangsunglah aneka kegiatan seremonial dan upacara yang gegap gempita untuk merayakannya. (Todaro dan Smith, 2006;3).

Salah satu kriteria evaluasi pembangunan disampaikan Dunn (Riant, 2003:4) dengan menentukan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan.

Kepala Daerah baru diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk lima tahun yang akan datang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini seringkali mencerminkan apa yang telah dijanjikan dalam masa kampanye. Sehingga apa yang disusun dalam Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah ini lebih banyak mengedepankan program-program yang disampaikan pada masa kampanye dan sedikit mempertimbangkan capaian periode sebelumnya. Sementara itu proses pembangunan perlu menganut azas keberlanjutan.

Untuk dapat memberikan penyelesaian masalah perlu dilakukan suatu kajian empirik yang mampu memperlihatkan capaian pembangunan, yang mana hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah untuk periode berikutnya.

Studi secara keseluruhan menggunakan desain deskriptif sehingga diharapkan dapat diketahui capaian indikator-indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Riset ini menggunakan data-data yang bersumber langsung dari responden (data primer) dan data-data yang diperoleh dari institusi/lembaga/internet, yang sudah dipublikasikan (data sekunder). Intitusi / lembaga tersebut diantaranya Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Populasi dalam riset ini ditentukan adalah mahasiswa aktif Universitas Ibn Khaldun Bogor, dengan technique sampling Kuota aksidental. Dimana sample ditentukan sebanyak 500 mahasiswa aktif. Penelitian dibatasi pada persepsi kinerja pembangunan Kota Bogor pada periode 2009-2014.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi

Penggunaan terminologi *pembangunan didefinisi* oleh kalangan ekonom secara berbeda sesuai dengan sudut pandang para ekonom tersebut, sehingga defenisi tentang pembangunan pun sedemikian variatifnya. Menurut Irawan (1981;20), Pembangunan ekonomi menunjukkan perubahan-perubahan dalam struktur output dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian disamping kenaikan output. Pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan.

Sementara itu Sadono Sukirno (1981;13) mengatakan bahwa Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting, yaitu :

- a. Suatu proses, perubahan yang terjadi terus menerus.
- b. Usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita
- c. Kenaikan pendapatan perkapita itu harus berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Todaro (1991;10) berpendapat bahwa Konsepsi-konsepsi pembangunan ekonomi dan modernisasi mengandung, baik secara implisit maupun eksplisit, tata nilai tentang tujuan-tujuan yang diinginkan untuk mencapai sesuatu.

Dari beberapa pendapat di atas terdapat beberapa kata kunci terkait dengan pembangunan ekonomi, diantaranya adalah:

- a. Pembangunan ekonomi mengisyaratkan adanya pertumbuhan output.
- b. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang terus menerus.
- c. Dalam pembangunan ekonomi ada nilai-nilai yang dianut dalam prosesnya.

Secara umum istilah *pembangunan* ini dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian berdasarkan periode waktunya yaitu pandangan lama berdasarkan indikator-indikator ekonomi tradisional dan pandangan baru ekonomi pembangunan.

a. Ekonomi Tradisional

Menurut pengertian akademis ilmu ekonomi yang ketat, istilah *pembangunan* (development) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi-kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas **Pendapatan Nasional Bruto** atau **GNP (Gross National Product)**-nya pada tingkat 5 persen hingga 7 persen, atau bahkan lebih tinggi lagi. Ukuran lain yang mirip dengan GNP, yakni yang dikenal dengan istilah **Produk Domestic Bruto** atau **GDP (Gross Domestic Product)**. Indeks ekonomi lainnya yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan adalah tingkat pertumbuhan **Pendapatan Per Kapita (Income Per Capita)** atau **GNP Per Kapita**. Indeks ini pada dasarnya mengukur kemampuan diri suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan per kapita “rill” (yakni, sama dengan pertumbuhan GNP per kapita dalam satuan moneter dikurangi dengan tingkat inflasi) merupakan tolok ukur ekonomis yang paling sering digunakan untuk mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomis dari suatu bangsa. Berdasarkan tolok ukur tersebut, maka kita akan mengetahui seberapa banyak barang dan jasa-jasa rill yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi.

Pembangunan ekonomi pada masa lampau juga sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumber daya (*employment*) yang diupayakan secara terencana. Biasanya dalam proses tersebut peranan sektor pertanian akan menurun untuk memberi kesempatan bagi tampilnya sektor-sektor manufaktur dan jasa-jasa yang secara sengaja diupayakan agar terus berkembang. Oleh karena itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada upaya untuk menciptakan industrialisasi secara besar-besaran sehingga kadangkala

mengorbankan kepentingan pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan pada umumnya yang sebenarnya tidak kalah pentingnya. Jelaslah, bahwa penerapan tolok ukur pembangunan yang murni bersifat ekonomis tersebut, agar lebih akurat dan bermanfaat, harus didukung pula oleh indikator-indikator sosial (*social indicators*) nonekonomis.

Secara umum, sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP, baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan menetes dengan sendiri sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Itulah yang secara luas dikenal sebagai prinsip “efek penetesan ke bawah” (*trickle down effect*). Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sehingga masalah-masalah lain seperti sosial kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan acapkali dinomorduakan.

b. Pandangan Baru Ekonomi Pembangunan

Pengalaman pada dekade 1950-an dan 1960-an, ketika banyak di antara negara-negara dunia ketiga berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam defenisi pembangunan yang dianut selama itu. Semakin lama semakin banyak ekonom dan perumus kebijakan yang meragukan ketepatan dan kemampuan “tolok ukur GNP” sebagai indikator tunggal atas terciptanya kemakmuran dan kriteria kinerja pembangunan. Mereka mulai mempertimbangkan untuk mengubah strategi guna mengatasi secara langsung berbagai masalah mendesak seperti tingkat kemiskinan absolut yang semakin parah, ketimpangan pendapatan yang semakin mencolok, dan tingkat pengangguran yang terus melonjak. Singkatnya, selama dekade 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefenisi. Mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari usaha-

usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Penyesuaian definisi pertumbuhan yang kini lebih didasarkan pada konsep “redistribusi kemakmuran” itu merupakan slogan yang populer pada masa itu. Dalam konteks ini, Prof. Dudley Seers mengajukan serangkaian pertanyaan mendasar mengenai makna pembangunan, yang kemudian berkembang menjadi definisi baru pembangunan sebagai berikut: (Todaro, 2006;20)

“pertanyaan-pertanyaan mengenai pembangunan suatu negara yang harus diajukan adalah: apa yang terjadi dengan kemiskinan penduduk di negara itu? Bagaimana dengan tingkat penganggurannya? Adakah perubahan-perubahan berarti yang berlangsung atas penanggulangan masalah ketimpangan pendapatan? Jika ketiga permasalahan tersebut selama periode tertentu sedikit banyak telah teratasi, maka tidak diragukan lagi bahwa periode tersebut memang merupakan periode pembangunan bagi negara yang bersangkutan. Akan tetapi, jika satu, dua, atau bahkan semua dari ketiga persoalan mendasar tersebut menjadi semakin buruk, maka negara itu tidak bisa dikatakan telah mengalami proses pembangunan yang positif, meskipun barangkali selama kurun waktu tersebut pendapatan per kapitanya mengalami peningkatan hingga dua kali lipat” (Seers, 1999: 45).

Menurut Sadono (1981;192-228) masalah-masalah dalam negeri yang dihadapi dalam proses pembangunan adalah :

- a. Tekanan Penduduk
- b. Tanah dan penggunaannya
- c. Pembangunan masyarakat desa Tabungan dalam negeri dan pembentukan kapital.
- d. Kewiraswastaan
- e. Prioritas dalam pembangunan ekonomi

Tiga Nilai Inti Pembangunan

Todaro (2006;26) mengutip pendapat Profesor Goulet bahwa paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar tersebut adalah kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*).

Dapat kita simpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Apapun komponen spesifik atas “kehidupan yang serba lebih baik” itu, bertolak dari tiga nilai pokok di atas, proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut : (Todaro,2006;28)

1. *Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok*, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. *Peningkatan standar hidup* yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. *Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial* bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pentingnya upaya pembangunan ekonomi diberbaai negara pada beberapa dasawarsa pertama seusai perang dunia kedua, tercermin pada penerimaan yang luas yang nyaris bersifat universal dan fungsi perencanaan pembangunan (*development planning*) sebagai jalur yang paling langsung dan paling meyakinkan untuk mencapai kemajuan ekonomi. (Todaro dan Smith ,2006;2)

Perencanaan telah menjadi semacam gaya hidup bagi para pemimpin serta aparat lembaga-lembaga dan kementerian dalam pemerintahan. Setiap lima tahun atau lebih, tatkala

tahapan akhir perencanaan pembangunan tiba , berlangsunglah aneka kegiatan seremonial dan upacara yang gegap gempita untuk merayakannya. (Todaro dan Smith ,2006;3)

Senada dengan Todaro dan smith, Dickison yang dikutip oleh Jhingan (1992;655), perencanaan ekonomi adalah pengambilan keputusan utama ekonomi tentang apa dan berapa banyak, bagaimana, bila dan dimana akan diproduksi, serta buat siapa akan dialokasikan, oleh badan pengambilan keputusan yang berwenang atas dasar pengamatan yang menyeluruh terhadap sistem perekonomian sebagai satu kesatuan.

Sementara itu Jhingan (1992;655) mendefinisikan Perencanaan ekonomi sebagai pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Masih menurut Jhingan (1992;694) Perencanaan pembangunan dimaksud untuk membangun perekonomian secara keseluruhan. Ia mencakup penerapan system pemilihan yang rasional terhadap sejumlah bidang investasi dan kekuatan pembangunan lainnya yang layak. Perencanaan pemabngunan juga mengamati hubungan-hubungan sektoral di dalam keseluruhan kerangka perekonomian.

Untuk melaksanakan proses pembangunan ekonomi diperlukan suatu perangkat yaitu kebijakan publik (*Public Policy*). Menurut Riant (2003,3) mengutip Thomas R Dye , Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Sementara menurut Harold Laswell, masih dalam buku Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, mengatakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. (Riant, 2003,3)

Carl I Friedrick mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakanyang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (riant, 2003;4).

Dan menurut Riant (2003;4) kebijakan publik didefinisikan sebagai Segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Kebijakan publik “ memilih dan tidak memilih” dapat dipahami dalam matrik sebagai berikut : (riant, 2003;6)

	Kegiatan strategis	Kegiatan tidak/kurang strategis
Masyarakat mampu melaksanakan	I Pemerintah (dengan masyarakat)	II Masyarakat
Masyarakat tidak mampu untuk melaksanakan	III Pemerintah	IV Pemerintah (dibiarkan)

Dunn, menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik seabgai berikut : (Riant,2003;186)

Tipe criteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banayak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan	Unit biaya, manfaat bersih, Rasio cost-benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap, efektivitas tetap
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok yang berbeda.	Konsistensi dengan survei warganegara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	Program Publik harus merata dan efisien

Pemerintahan Daerah

Dengan munculnya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dinamika tata keperintahan di Indonesia memasuki babak baru berupa otonomi daerah, yang implementasinya di tahun 2001. Tahun 2004, desentralisasi wewenang dan

desentralisasi fiskal semakin menguat dengan munculnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 pada Pasal 1 (5) “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dan Pasal 1 (6) Daerah otonom: kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur & mengurus urusan pemerintahan & kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

Dengan demikian bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menggali atau mencari sumber-sumber dana pembangunan serta keleluasaan dalam penggunaan dana tersebut. Pasca UU Otonomi Daerah ini, Pemerintah Daerah berubah fungsinya dari operator ke inisiator, regulator, evaluator.

Skala Prioritas kebijakan pembangunan Kota Bogor 2009-2014

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2008-2014, di tentukan 4 skala prioritas pembangunan Kota Bogor yaitu :

- a. Penanganan PKL
- b. Transportasi
- c. Kemiskinan dn
- d. Kebersihan

Masing-masing skala prioritas tersebut ditentukan indikator-indikatornya sehingga pencapaiannya dapat diukur. Beberapa dimensi dalam skala prioritas tersebut diantaranya :

- a. Penanganan PKL, beberapa indikatornya :
 - Kegiatan pembinaan PKL.
 - Penyuluhan peningkatan disiplin PKL.
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas taman kota dan taman lingkungan hidup.
 - Manajemen dan rekayasa lalulintas di zona PKL.
 - Ketersediaan sarana pengaman lalulintas.
 - Koordinasi Penertiban.
- b. Transportasi, beberapa indikatornya :

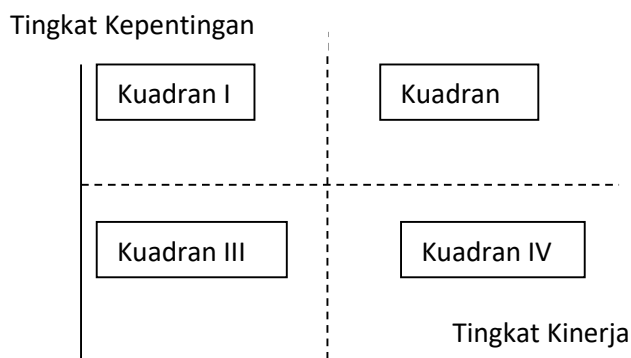
- Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.
 - Ketersediaan dan kualitas trotoar
 - Ketersediaan dan kualitas drainase (saluran air)
 - Pemeliharaan Jalan, jembatan, trotoar dan drainase
 - Ketersediaan dan kualitas sarana angkutan umum
 - Penanganan kemacetan
 - Ketersediaan dan kualitas rambu lalu lintas
 - Ketertiban dan kedisiplinan dalam perjalanan
 - Kualitas terminal bis
 - Keamanan dalam perjalanan
- c. Kemiskinan, beberapa indikatornya :
- Mutu, distribusi, pangan bagi masyarakat miskin
 - Kuantitas dan kualitas kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - Program perbaikan rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh.
 - Akses dan layanan dan kualitas pendidikan untuk gakin.
 - Kegiatan jamkesmas, kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat serta lingkungan sehat.
 - Peningkatan peran serta wanita dan kesetaraan gender.
 - Program pemberdayaan fakir miskin, anak terlantar dan pembinaan penyandang cacat.
- d. Kebersihan, indikatornya :
- Sarana pengangkutan sampah
 - ketersediaan tempat pembuangan sementara.

Analisis Kinerja dan Tingkat Kepentingan

Kepuasan dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu harapan akan kinerja sebuah produk dan kenyataan yang diterima. Salah satu metode pengukuran kepuasan yaitu menurut ACSI (American Customer Satisfaction Index) dimana kepuasan konsumen bermula dari perceived Quality, Customer Expectation, Perceived Value, yang selanjutnya akan berdampak pada Customer Loyalty.

Pengukuran kepuasan yang lain yaitu model fishbein, dimana model ini mengukur kepuasan dengan mempertimbangkan atribut-atribut yang melekat pada produk/jasa. Atribut tersebut diukur pada tingkat harapan (Expectation) dan kinerja (performance) dengan menggunakan formulasi $A_o = \sum B_i.X_i$ dimana B_i adalah Keyakinan terhadap atribut i dari objek yang diamati, dan X_i adalah Evaluasi dari sejumlah atribut i . Dengan analisis fishbein ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan diagram cartecius, sehingga akan terlihat atribut-atribut apasaja yang telah dirasakan memuaskan dan penting, penting namun tidak memuaskan, tidak penting dan tidak memuaskan serta tidak penting dan berlebihan. Diagram cartesius terbagi ke dalam empat kuadran yaitu : (Gambar 1)

- Kuadran I : Kinerja yang rendah namun tingkat kepentingan di anggap tinggi.
- Kuadran II : Kinerja dan tingkat kepentingan yang tinggi di atas rata-rata.
- Kuadran III: Kinerja dan tingkat kepentingan di bawah rata-rata.
- Kuadran IV: Kinerja yang tinggi namun tingkat kepentingan rendah (dibawah rata-rata).



Gambar 1. Diagram Cartesius

III. METODE PENELITIAN

Penelitian memfokuskan pada persepsi mahasiswa atas kinerja pembangunan di Kota Bogor pada 4 Bidang Skala Prioritas, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor 2009-2013, yaitu : Penanganan Pedagang Kaki Lima, Transportasi, Kemiskinan, dan Kebersihan. Program-program Penanganan Pedagang Kaki Lima yaitu kegiatan pembinaan, penyuluhan dan peningkatan disiplin pedagang kaki lima, peningkatan kualitas dan kuantitas taman dan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa lalu lintas di zona pedagang kaki lima, koordinasi penertiban serta ketersediaan sarana dan pengamanan lalu lintas. Program skala

prioritas transportasi yaitu kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan, ketersediaan dan kualitas trotoar dan drainase, ketersediaan dan kualitas angkutan umum, penanganan kemacetan, ketersediaan dan kualitas rambu lalu lintas, ketertiban dan kedisiplinan dalam perjalanan, kualitas terminal bus serta keamanan dalam perjalanan. Program Kemiskinan diprioritaskan pada program Mutu, distribusi, pangan bagi masyarakat miskin, Kuantitas dan kualitas kegiatan pemberdayaan masyarakat, Program perbaikan rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh, Akses dan layanan dan kualitas pendidikan untuk keluarga miskin, Kegiatan jaminan kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat serta lingkungan sehat, Peningkatan peran serta wanita dan kesetaraan gender, Program pemberdayaan fakir miskin, anak terlantar dan pembinaan penyandang cacat. Sarana pengangkutan sampah, ketersediaan tempat pembuangan sementara, menjadi program dari skala prioritas penanganan permasalahan kebersihan.

Studi dilaksanakan di Kampus Universitas Ibn Khaldun Bogor dan berlangsung selama 2 Bulan yaitu Bulan April 2014 sampai dengan Mei 2014.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuisisioner yang disebarkan kepada mahasiswa berjumlah 500 kuisisioner dengan total pertanyaan 32 item untuk pengukuran kinerja (Bi) dan 32 item untuk pengukuran tingkat kepentingan/Evaluasi (Xi). Dari 500 kuisisioner hanya 431 kuisisioner yang terisi secara lengkap, sementara 69 kuisisioner tidak terisi secara lengkap. Dengan demikian yang digunakan untuk analisis adalah 431 kuisisioner yang terisi lengkap, yang terdiri dari 165 laki-laki dan 266 wanita.

Berdasarkan persepsi responden mahasiswa bahwa terdapat total skor Attitude to the Object (Ao) sebesar 222.653. Manakala skor jawaban pada kinerja (Bi) dan Tingkat Kepentingan (Xi) pada skor maksimal yaitu 5 maka akan diperoleh Ao maksimal sebesar 452.550. Dengan demikian kepuasan responden terhadap kinerja pembangunan Kota Bogor dipersepsikan baru mencapai 49.2%.

Capaian Penanganan Pedagang Kaki Lima masih terdapat gap/kesenjangan yang terjadi antara kinerja program penataan/penganganan masalah Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara keseluruhan terdapat gap 1.50 antara kinerja

dengan tingkat kepentingan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor yang dipersepsikan oleh responden. Gap terbesar yaitu Pembinaan Pedagang Kaki Lima dimana gap sebesar 1.61 dimana hal ini lebih besar dari rata-rata dimensinya. Dengan menggunakan kategori pengukuran, maka rata-rata kinerja penataan Pedagang Kaki Lima masuk pada kategori Cukup Puas (2.8 sampai dengan 3.6). Dan rata-rata Tingkat kepentingan masuk kategori Penting (3.7 sampai dengan 4.5).

Rata-rata kinerja berdasarkan persepsi responden mahasiswa tentang skala prioritas pembangunan Kota Bogor pada bidang Transportasi yaitu 2.69 masuk pada kategori Tidak Puas (1.9 sampai dengan 2.7) dan rata-rata tingkat kepentingan termasuk pada kategori Penting (3.7 sampai dengan 4.5). Kesenjangan terbesar yaitu mengenai penanganan kemacetan, dengan gap sebesar 1.90.

Dimensi Kemiskinan, dipersepsikan bahwa masih ada 8 indikator yang masuk pada kategori Tidak Puas (1.9 sampai dengan 2.7) dan hanya 3 indikator yang masuk kategori Cukup Puas (2.8 sampai dengan 3.6). Nilai Mean pada Dimensi Kemiskinan masuk kategori Tidak Puas, dan Tingkat kepentingan pada dimensi ini masuk pada kategori Sangat Penting (4.6 sampai dengan 5). Gap/kesenjangan terbesar yaitu pada indikator distribusi pangan untuk gakin (keluarga miskin), kuantitas pemberdayaan masyarakat, kualitas pemberdayaan masyarakat, penataan kawasan kumuh, pemberdayaan fakir miskin anak terlantar dan cacat, akses pendidikan bagi gakin, serta peningkatan gizi masyarakat.

Skala Prioritas keempat yaitu masalah kebersihan. Pengukuran menggunakan 2 indikator yang berdasarkan persepsi responden, kinerja program kebersihan di Kota Bogor masuk pada kategori Tidak Puas. Kedua indikator pada dimensi ini dikategorikan pada Tidak Puas. Tingkat Kepentingan pada dimensi Kebersihan ini masuk kategori Penting dan Sangat Penting. Kesenjangan antara Kinerja dan Tingkat kepentingan pada dimensi kebersihan ini sangat besar yaitu sebesar 2.07.

Kinerja Pencapaian Skala Prioritas di Kota Bogor masuk pada kategori Tidak Puas. Terdapat tiga skala prioritas yang kinerjanya termasuk pada kategori Tidak Puas yaitu Transportasi, Kemiskinan dan Kebersihan. Sementara indikator kinerja Pedagang Kaki Lima masuk pada kategori Cukup Puas. Tingkat Kepentingan pada skala prioritas masuk pada kategori Penting, dan semua dimensi dianggap Penting oleh responden.

Diagram cartecius untuk persepsi kinerja pembangunan Kota Bogor pada kurun waktu 5 tahun terakhir (2009-2013)Skala Prioritas pada bidang Kebersihan menempati kuadran I, dimana hal ini menunjukkan bahwa kinerja program kebersihan berada dibawah rata-rata kinerja semua skala prioritas. Disisi lain bahwa kebersihan dipersepsikan tingkat kepentingannya di atas rata-rata tingkat kepentingan seluruh dimensi. Kuadran II ditempat oleh Pedagang Kaki lima menunjukkan bahwa rata-rata kinerja Pedagang kaki lima dipersepsikan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan tingkat kepentingannya juga berada di atas rata-rata. Kuadran III ditempat oleh Skala prioritas Kemiskinan dan Transportasi. Pada kuadran ini menunjukkan bahwa kinerja dan tingkat kepentingan berada di bawah rata-rata dari semua dimensi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kepuasan Responden terhadap Kinerja Pembangunan Kota Bogor tahun 2009 sampai dengan 2014 pada dimensi skala prioritas pembangunan Kota Bogor baru mencapai 49.2%. Nilai *Mean* Kinerja dari setiap dimensi masih di bawah rata-rata kecuali penataan Pedagang Kaki Lima. Dimensi Transportasi, Kemiskinan dan Kebersihan masuk pada kategori Tidak Puas dan dimensi Pedagang Kaki Lima masuk kategori Cukup Puas. Nilai *Mean* Tingkat kepentingan berada pada kategori Penting, untuk semua dimensi.

Saran

1. Dibutuhkan seorang pemimpin daerah, dalam hal ini kepala daerah yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki dimensi transportasi, penyelesaian kemiskinan dan kebersihan.
2. Penyusunan rencana jangka menengah (Lima tahunan) khususnya bagi pemenang PILKADA perlu mempertimbangan capaian pembangunan periode sebelumnya, sehingga dapat tercipta kesinambungan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Bogor , 2013, “Kota Bogor Dalam Angka 2013”, BPS Kota Bogor.

Badan Pusat Statistik Kota Bogor , 2011, “Kota Bogor Dalam Angka 2011”, BPS Kota Bogor.

[Irawan Drs.MBA, M. Suparmoko,Dr.MA, 1981, “Ekonomi Pembangunan” Edisi ketiga, UGM, Yogyakarta.](#)

[Michael P. Todaro, 1991, ”Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”, Edisi ketiga jilid 1, Erlangga, Jakarta.](#)

[Michael P. Todaro, 2006, ”Pembangunan Ekonomi”, Edisi Kesembilan, jilid 1, Erlangga, Jakarta.](#)

[Michael P. Todaro, dan stephen C Smith,2006, ”Pembangunan Ekonomi”, Edisi Kesembilan, jilid 2, Erlangga, Jakarta.](#)

[M.L Jhingan, 1992, “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan” , Rajawali, Jakarta](#)

[Sadono Sukirno.,Drs.Ek.M.Soc.Sc, 1981, “ Ekonomi Pembangunan”, Cetakan Kedua, Borta Gorat Medan.](#)

[Riant Nugroho Dwijowojoto, 2003, “ Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi”, Elex Media Komputindo, Jakarta](#)

<http://www.kotabogor.go.id>

Biografi penulis

Penulis di Lahir 45 tahun lalu yaitu tahun 1971 di Kabupaten Bogor. Tahun 1998 penulis melanjutkan sekolah di SMAN 1 Kota Bogor. Perguruan Tinggi Sarjana (Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen) ditempuh di Universitas Ibn Khaldun Bogor, yang juga merupakan tempat beraktivitas penulis sebagai dosen sejak 2000 sampai dengan saat ini. Tahun 2010 penulis mendapatkan penghargaan dari Depertemen Pekerjaan Umum (sekarang Kemenpera PU) sebagai pemenang call for proposal Kota Lestari. Tahun 2012 penulis menulis buku metode penelitian yang diterbitkan oleh jelajah nusa yang didistribusikan di seluruh Indonesia.
